



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI, Jum'at 14 Juni 2024



RINGKASAN BERITA HARI INI

Enam Bakal Calon Bupati dari PKB Ikuti UKK

Hasilnya Jadi Landasan Rekomendasi

SIDOARJO - Enam bakal calon bupati Sidoarjo (*lihat grafts*) yang sudah mendaftar lewat PKB hari ini (14/6) mulai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (UKK) di kantor DPP PKB di Jakarta Pusat. Hasilnya akan menjadi pertimbangan DPP PKB untuk merekomendasi calon yang akan diusung. "Pelaksanaan UKK ini adalah proses tahapan DPP PKB mengeluarkan rekomendasi kepada bakal calon," kata Ketua Desk Pilkada DPC PKB Sidoarjo Abdillah Nashih. Setidaknya ada empat hal yang harus disiapkan bakal calon. Yakni, visi-misi tentang PKB, visi dan misi dalam pencalonan, potensi dukungan partai politik selain PKB, dan strategi pemenangan dalam pilkada. Setelah UKK selesai, DPP PKB bakal memberikan surat tugas kepada bakal calon. Surat tugas



TEBAR VISI-MISI: Deretan balihu calon bupati Sidoarjo di Jalan Raya Piloso kemarin.

tersebut jadi kesempatan bakal calon untuk meningkatkan elektabilitas sebelum nanti rekomendasi diberikan. "Jika ada yang menyebut rekomendasi sudah turun, dipastikan itu tidak benar. Karena masih menunggu hasil UKK," ujar Nashih. Sekretaris Desk Pilkada DPC PKB Sidoarjo Sihabudin menambahkan, para calon tersebut sudah diundang. Sementara ini

UKK masih diperuntukkan bakal calon bupati. "Sementara ini masih yang bakal calon bupati, untuk bakal calon wakil bupati menunggu instruksi dan undangan dari DPP PKB," katanya. Sihab mengatakan, ada bakal calon bupati tersebut yang mendaftar secara langsung ke kantor DPC PKB Sidoarjo. Namun, ada pula yang mendaftar secara online tanpa ke DPC PKB

Enam Bakal Calon Bupati dari PKB yang Mengikuti UKK

- Subandi Pti bupati Sidoarjo
- Usman Ketua DPRD Sidoarjo
- Achmad Amir Asilichin Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, putra mantan Bupati Sidoarjo Saifulillah
- Fandi Utomo Mantan anggota DPR RI (periode 2014-2019)
- Sugiono Adi Salam Pengusaha asli Sidoarjo
- Muhammad Shofri Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Sidoarjo



GRAND BUDI HARJO POS

Sidoarjo. "Semua cakada harus didaftarkan di *link sicakada.pkb.id*, bisa daftar sendiri atau didaftarkan *tin desk pilkada*," kata Sihab. Dia menyebut, Fandi Utomo dan Sugiono mendaftar secara online. Berkas pendaftaran juga di *upload* secara online. "Berkas tidak harus diserahkan ke DPC Sidoarjo, cukup online, tapi beliau sudah konfirmasi ke DPC," jelasnya. (uzi/c6/any)

242 Kades Terima SK Perpanjangan Masa Jabatan

SIDOARJO - Sebanyak 242 Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo menerima surat keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan dari Pti Bupati Sidoarjo H. Subandi di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (13/6/24).

Terlihat wajah ratusan kades sumringah dan penuh semangat karena pengabdian mereka untuk membangun desa diperpanjang, dari 6 tahun menjadi 8 tahun, artinya ada tambahan dua tahun masa bakti. Sesuai Undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Pti Bupati Sidoarjo, Subandi dalam sambutannya berpesan, kepala desa yang sudah mendapat perpanjangan masa jabatan untuk bekerja lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk mewujudkan kemandirian desa, baik secara ekonomi, sosial maupun politik.

"Dengan tambahan 2 tahun masa jabatan ini kami berharap dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan program-program pembangunan untuk kemajuan desa," kata Subandi.

Subandi juga mengajak semua kepala desa untuk saling bersinergi, berdiskusi dan saling memberikan dukungan satu sama lain. Subandi ingin desa-desa di Kabupaten Sidoarjo bisa mandiri.

"Yang tak kalah penting juga menjaga kondusifitas pemerintahan desa," ucapnya.

Menurutnya desa yang mandiri akan berkontribusi pada pertumbuhan berbasis keunggulan sumber daya dan kebutuhan lokal.

Selain itu desa yang mandiri akan efektif dan efisien dalam

menyediakan layanan publik, pengelolaan anggaran dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

"Saya juga menekankan agar pelayanan publik harus menjadi prioritas bagi kepala desa beserta jajarannya. Dimana reformasi birokrasi tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetapi juga di level pemerintah desa," lanjutnya.

Ia juga mengajak kepala desa untuk menciptakan kemandirian desa khususnya dari aspek pendapatan asli desa (PAD). Setiap potensi yang ada bisa dikembangkan dan bisa berkolaborasi dengan banyak pihak untuk mensupport pembangunan yang ada di desa masing-masing.

"Kolaborasi dengan semua stakeholder dan masyarakat ini sangat penting untuk menunjang percepatan pembangunan yang ada di desa," ungkapnya.

Lebih lanjut, setiap berada di forum kepala desa, Ia selalu menyerukan program penurunan kasus stunting di Kabupaten Sidoarjo, terutama dalam menggalakkan Sidoarjo bebas Open Defecation Free (ODF).

Terpisah, terkait diberikannya SK perpanjangan, Kepala Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Sugeng Bahagia, kepada Duta Masyarakat mengaku bersyukur. "Semoga saya mimpin Desa Banjarbendo, amanah diberikan oleh Allah SWT Desa yang terbaik. Aamiin YRA," harapnya.

"Semoga Allah SWT memberikan semua masyarakat tambah senang dan tambah semangat, bersatu rukun bangun Desa di segala bidang," pungkas Sugeng. ● Loe



RESMI BERTAMBAH: Para kepala desa di Sidoarjo setelah menerima SK perpanjangan masa jabatan di Pendopo Delta Wibawa kemarin.

Jabatan 242 Kades Resmi Bertambah Dua Tahun

SIDOARJO - Masa jabatan seluruh kepala desa (Kades) di Sidoarjo kini resmi diperpanjang dua tahun. Kemarin (13/5) sebanyak 242 Kades di Sidoarjo menerima surat keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan di Pendopo Delta Wibawa dari Pti Bupati Sidoarjo Subandi. Kini, jabatan mereka resmi menjadi 8 tahun.

Subandi meminta, dengan bertambahnya masa jabatan tersebut, pembangunan di desa juga meningkat. Layanan harus semakin

baik. "Yang terpenting, harus hati-hati," pintanya. Hindari pungi dan lainnya yang menyalaui aturan.

Asisten I Sekretariat Daerah Pemkab Sidoarjo M. Ainur Rahman menyatakan, ada 242 kepala desa yang resmi diperpanjang lewat SK bupati kemarin. Sebelumnya, pada 5 Mei lalu, ada 58 kepala desa yang diberi SK. "Artinya, sekarang seluruh kepala desa sudah memiliki SK perpanjangan masa jabatan," katanya. Dia menyatakan, 58 SK itu didahu-

lukkan karena para Kades tersebut akan berakhir masa jabatannya pada Mei. Meskipun, surat edaran (SE) menteri dalam negeri terkait perpanjangan masa jabatan belum turun. "Agar tidak sampai ada kekosongan jabatan dan diganti pelaksana harian," katanya.

Kini, SE Mendagri sudah dilayangkan ke tiap daerah. "Sesuai amanat SE Mendagri, maksimal Juni harus sudah diserahkan SK-nya ke kepala desa. Karena itu, hari ini

(kemarin, Red) diserahkan," jelasnya. Kepala Desa Banjar Kemuning Zainul Abidin berkomitmen terus mengembangkan desa. Baik pelayanan maupun pengembangan ekonomi. Senada, Kepala Desa Semampir Luqman Muallim menyatakan bahwa kepala desa harus semakin inovatif untuk mengembangkan desa. "Karena tantangan ke depan akan semakin banyak, layanan harus terus dioptimalkan," jelasnya. (uzi/c12/any)

Pemkab Bebaskan Denda Pajak hingga September

KOTA - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mengencakan program pembangunan di berbagai bidang. Seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Untuk mendukung program-program tersebut, diperlukan ketersediaan anggaran daerah yang memadai, salah satu sumbernya berasal dari pendapatan pajak.

Oleh karena itu, Pemkab Sidoarjo kembali menggelar

Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pordesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di desa-desa. Selain itu, untuk meringankan beban wajib pajak, Pemkab Sidoarjo membebaskan denda keterlambatan pembayaran pajak daerah mulai 1 Juni hingga 27 September 2024.

Pti Bupati Sidoarjo Subandi menjelaskan bahwa pendapatan dari pajak pada hakikatnya akan kembali ke-

pada masyarakat dalam bentuk pembangunan. "Masyarakatlah yang akan merasakan manfaat pembangunan dari pajak yang mereka bayarkan," terang Subandi saat Sosialisasi PBB-P2 di Balai Desa Singkalan, Kecamatan Balongbendo pada Rabu, 12 Juni 2024.

Sosialisasi PBB-P2 itu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat membayar

pajak, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo dapat meningkat optimal. "Kami berharap sosialisasi PBB seperti ini dapat terus dilakukan agar masyarakat membayar pajak yang menjadi kewajibannya," harap Subandi.

Pembebasan denda berlaku untuk wajib pajak yang belum membayar pajak tertunggak sampai dengan masa pajak tahun pajak 2023 dan

April 2024.

Jenis pajak yang termasuk dalam program ini adalah PBB-P2, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak reklame, pajak air tanah, dan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang meliputi pajak makanan dan minuman, pajak tenaga listrik, pajak jasa perhotelan, pajak jasa parkir, dan pajak jasa kesenian dan hiburan. (nis/vga)

INI PENJELASAN KADES PEPE TERKAIT DANA BK YANG MASIH MENGENDAP DI REKENING DESA

Sidoarjo, Pojok Kiri

Kepala Desa Pepe Kecamatan Sedati, Moh. Yasin angkat bicara soal pemberitaan di media online yang menyebut belum terserapnya dana BK dari Kabupaten Sidoarjo.

Ditemui awak media di kantor Desa Pepe Rabu 12 Juni 2024 Yasin menjelaskan bahwa dana tersebut belum bisa dimanfaatkan karena yang rencana di peruntukan pembangunan paving di wilayah RW 10 ternyata belum di serah terimakan ke Pemerintah Daerah (PERKIM).

Berbagai upaya sudah kami lakukan, termasuk bersurat ke Dinas supaya dapat rekam untuk realisasi BK tersebut ke RW 10 namun jawaban dari Dinas PUPR tidak mengizinkan, jelasnya.

Lebih lanjut Yasin mengatakan bahwa dana itu memang masih di rekening desa dan masih utuh belum digunakan. Kita tidak mau menabrak aturan regulasi yang ada, bisa runyam mas.

Pemerintah Desa sendiri sangat senang dan terbantu

dengan Dana BK dari beberapa devan-agar pemerataan pembangunan di Desa Pepe dapat terwujud, sehingga menjadikan Desa Pepe bisa lebih makmur dan maju.

Pemerintah Desa harus melaksanakan pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tercipta terbit administrasi dalam penca- nangan anggaran Desa dan terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari," tuturnya.

Hal senada juga di sampaikan Jaihi, Kasir Pembangunan Desa Pepe, "Kita tidak mau ambil resiko mas" semua kita jalankan sesuai aturan yang berlaku. Kita akan berupaya se maksimal mungkin agar apa yang di inginkan kavleng Bougenville untuk pembangunan paving segera terealisasi.

Kami sudah berkoordinasi dengan ketua RW dan RT untuk berupaya mendapatkan rekam atau persetujuan dari Dinas terkait agar apa yang di inginkan warga bisa terwujud. (Edy)



DPRD Kabupaten Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Bebaskan Denda Pajak hingga September

KOTA - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mengencangkan program pembangunan di berbagai bidang. Seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Untuk mendukung program-program tersebut, diperlukan ketersediaan anggaran daerah yang memadai, salah satu sumbernya berasal dari pendapatan pajak.

Oleh karena itu, Pemkab Sidoarjo kembali menggelar

Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di desa-desa. Selain itu, untuk meringankan beban wajib pajak, Pemkab Sidoarjo membebaskan denda keterlambatan pembayaran pajak daerah mulai 1 Juni hingga 27 September 2024.

Plt Bupati Sidoarjo Subandi menjelaskan bahwa pendapatan dari pajak pada hakikatnya akan kembali ke-

pada masyarakat dalam bentuk pembangunan. "Masyarakatlah yang akan merasakan manfaat pembangunan dari pajak yang mereka bayarkan," terang Subandi saat Sosialisasi PBB-P2 di Balai Desa Singkalan, Kecamatan Balongbendo pada Rabu, 12 Juni 2024.

Sosialisasi PBB-P2 itu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat membayar

pajak, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo dapat meningkat optimal. "Kami harapkan sosialisasi PBB seperti ini dapat terus dilakukan agar masyarakat membayar pajak yang menjadi kewajibannya," harap Subandi.

Pembebasan denda berlaku untuk wajib pajak yang belum membayar pajak terutang sampai dengan masa pajak tahun pajak 2023 dan

April 2024.

Jenis pajak yang termasuk dalam program ini adalah PBB-P2, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak reklame, pajak air tanah, dan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang meliputi pajak makanan dan minuman, pajak tenaga listrik, pajak jasa perhotelan, pajak jasa parkir, dan pajak jasa kesenian dan hiburan. (nis/vga)



INI PENJELASAN KADES PEPE TERKAIT DANA BK YANG MASIH MENGENDAP DI REKENING DESA

Sidoarjo, Pojok Kiri

Kepala Desa Pepe Kecamatan Sedati Moh. Yasir angkat bicara soal pemberitaan di media online yang menyebut belum terserapnya dana BK dari Kabupaten Sidoarjo.

Ditemui awak media di kantor Desa Pepe Rabu 12 Juni 2024 Yasir menjelaskan bahwa dana tersebut belum bisa di manfaatkan karena yang rencana di peruntukan pembangunan paving di wilayah RW 10 ternyata belum di serah terimakan ke Pemerintah Daerah (PERKIM).

Berbagai upaya sudah kami lakukan, termasuk bersurat ke Dinas supaya dapat rekom untuk realisasi BK tersebut ke RW 10 namun jawaban dari Dinas PUPR tidak mengijinkan, jelasnya.

Lebih lanjut Yasir mengatakan bahwa dana itu memang masih di rekening desa dan masih utuh belum digunakan. Kita tidak mau menabrak aturan atau regulasi yang ada, bisa runyam mas.

Pemerintah Desa sendiri sangat senang dan terbantu

dengan Dana BK dari beberapa dewan, agar pemerataan pembangunan di Desa Pepe dapat terwujud, sehingga menjadikan Desa Pepe bisa lebih makmur dan maju

Pemerintah Desa harus melaksanakan pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tercipta tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan Desa dan terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari," tuturnya.

Hal senada juga di sampaikan Jaini, Kasi Pembangunan Desa Pepe, "kita tidak mau ambil resiko mas" semua kita jalankan sesuai aturan yang berlaku Kita akan berupaya se maksimal mungkin agar apa yang di inginkan kavling Bougenville untuk pembangunan paving segera terealisasi.

Kami sudah berkoordinasi dengan ketua RW dan RT untuk berupaya mendapatkan rekom atau persetujuan dari Dinas terkait agar apa yang di inginkan warga bisa terwujud. (Edy)



OPPO Reno4 F · ©Harian Bangsa
2024/04/01 14:47



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

242 Kades Terima SK Perpanjangan Masa Jabatan

SIDOARJO - Sebanyak 242 Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo menerima surat keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan dari Plt Bupati Sidoarjo H. Subandi di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (13/6/24).

Terlihat wajah ratusan kades sumringah dan penuh semangat karena pengabdian mereka untuk membangun desa diperpanjang, dari 6 tahun menjadi 8 tahun, artinya ada tambahan dua tahun masa bakti. Sesuai Undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Plt Bupati Sidoarjo, Subandi dalam sambutannya berpesan, kepala desa yang sudah mendapat perpanjangan masa jabatan untuk bekerja lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk mewujudkan kemandirian desa, baik secara ekonomi, sosial maupun politik.

“Dengan tambahan 2 tahun masa jabatan ini kami berharap dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan program-program pembangunan untuk kemajuan desa,” kata Subandi.

Subandi juga mengajak semua kepala desa untuk saling bersinergi, berdiskusi dan saling memberikan dukungan satu sama lain. Subandi ingin desa-desa di Kabupaten Sidoarjo bisa mandiri.

“Yang tak kalah penting juga menjaga kondusifitas pemerintah desa,” ucapnya.

Mendukungnya, desa yang mandiri akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi

menyediakan layanan publik, pengelolaan anggaran dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

“Saya juga menekankan agar pelayanan publik harus menjadi prioritas bagi kepala desa beserta jajarannya. Dimana reformasi birokrasi tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetapi juga di level pemerintah desa,” lanjutnya

Ia juga mengajak kepala desa untuk menciptakan kemandirian desa khususnya dari aspek pendapatan asli desa (PAD). Setiap potensi yang ada bisa dikembangkan dan bisa berkolaborasi dengan banyak pihak untuk mensupport pembangunan yang ada di desa masing-masing.

“Kolaborasi dengan semua stakeholder dan masyarakat ini sangat penting untuk menunjang percepatan pembangunan yang ada di desa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, setiap berada di forum kepala desa, ia selalu menyerukan program penurunan kasus stunting di Kabupaten Sidoarjo, terutama dalam menggalakkan Sidoarjo bebas Open Defecation Free (ODF).

Terpisah, terkait diberikannya SK perpanjangan, Kepala Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Sugeng Bahagia, kepada Duta Masyarakat mengaku bersyukur. “Semoga saya mimpin Desa Banjarbendo, amanah diberikan oleh Allah SWT Desa yang terbaik. Amin! Ya Allah, Amin!”

“Semoga Allah SWT mem-

pada pertunbunan berbasis keunggulan sumber daya dan kebutuhan lokal.

Selain itu desa yang mandiri akan efektif dan efisien dalam

berikan semua masyarakat tambah senang dan tambah semangat, bersatu rukun bangun Desa di segala bidang,” pungkas Sugeng • Loe



LOETFU/DUTA

Kades di Sidoarjo terima SK perpanjangan masa jabatan Kamis (13/6/24) di Pendopo Delta

CS Dipindai dengan CamScanner

DUTA

Plt Bupati Sidoarjo Subandi saat melakukan fogging (pengasapan) guna mencegah penyebaran virus demam berdarah dengue (DBD).

Plt Sidoarjo Instruksikan Cegah DBD

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sidoarjo Subandi menginstruksikan kepada jajaran untuk melakukan pencegahan dan pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) dalam rangka memperingati ASEAN Dengue Day (ADD) Tahun 2024.

“Salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu menggalakkan penyuluhan dan pemberantasan sarang nyamuk dengan menguras, menutup, mendaur ulang, plus kegiatan lain yang mencegah perkembangbiakan dan gigitan nyamuk *Aedes aegypti*,” katanya di Sidoarjo, Kamis (13/6).

Ia mengemukakan pemberantasan sarang nyamuk tersebut dilaksanakan serentak dengan melibatkan kepala daerah, seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), beserta semua lapisan masyarakat.

“Kami telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Bupati Sidoarjo tentang imbauan penyelenggaraan kegiatan peringatan ASEAN Dengue Day (ADD) Tahun 2024 di lingkungan Pemkab Sidoarjo. SE Bupati Sidoarjo ini merupakan bentuk nyata dukungan peringatan ADD setiap tanggal 15 Juni,” katanya.

Dalam SE tersebut tertulis, “Mengimbau semua elemen bergerak secara rutin minimal seminggu sekali, giat menguras, menutup tempat penampungan air, dan memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas di lingkungan tempat tinggal masing-masing.” (md/rus)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



RESMI BERTAMBAH: Para kepala desa di Sidoarjo setelah menerima SK bupati terkait perpanjangan masa jabatan di Pendopo Delta Wibawa kemarin.

FIRMA ZUHDI/JAWA POS

Jabatan 242 Kades Resmi Bertambah Dua Tahun

SIDOARJO - Masa jabatan seluruh kepala desa (Kades) di Sidoarjo kini resmi diperpanjang dua tahun. Kemarin (13/5) sebanyak 242 Kades di Sidoarjo menerima surat keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan di Pendopo Delta Wibawa dari Plt Bupati Sidoarjo Subandi. Kini, jabatan mereka resmi menjadi 8 tahun.

Subandi meminta, dengan bertambahnya masa jabatan tersebut; pembangunan di desa juga meningkat. Layanan harus semakin

baik. "Yang terpenting, harus hati-hati," pintanya. Hindari pungli dan lainnya yang menyalahi aturan.

Asisten I Sekretariat Daerah Pemkab Sidoarjo M. Ainur Rahman menyatakan, ada 242 kepala desa yang resmi diperpanjang lewat SK bupati kemarin. Sebelumnya, pada 5 Mei lalu, ada 58 kepala desa yang diberi SK. "Artinya, sekarang seluruh kepala desa sudah memiliki SK perpanjangan masa jabatan," katanya.

Dia menyatakan, 58 SK itu didahu-

lukkan karena para Kades tersebut akan berakhir masa jabatannya pada Mei. Meskipun, surat edaran (SE) menteri dalam negeri terkait perpanjangan masa jabatan belum turun. "Agar tidak sampai ada kekosongan jabatan dan diganti pelaksana harian," katanya.

Kini, SE Mendagri sudah dilayangkan ke tiap daerah. "Sesuai amanat SE Mendagri, maksimal Juni harus sudah diserahkan SK-nya ke kepala desa. Karena itu, hari ini

(kemarin, Red) diserahkan," jelasnya.

Kepala Desa Banjar Kemuning Zainul Abidin berkomitmen terus mengembangkan desa. Baik pelayanan maupun pengembangan ekonomi. Senada, Kepala Desa Semampir Luqman Mualim menyatakan bahwa kepala desa harus semakin inovatif untuk mengembangkan desa. "Karena tantangan ke depan akan semakin banyak, layanan harus terus dioptimalkan," jelasnya. (uzi/c12/any)

Jawa Pos

Enam Bakal Calon Bupati dari PKB Ikuti UKK

Hasilnya Jadi Landasan Rekomendasi

SIDOARJO - Enam bakal calon bupati Sidoarjo (*lihat grafis*) yang sudah mendaftar lewat PKB hari ini (14/6) mulai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (UKK) di kantor DPP PKB di Jakarta Pusat. Hasilnya akan menjadi pertimbangan DPP PKB untuk merekomendasikan calon yang akan diusung.

"Pelaksanaan UKK ini adalah proses tahapan DPP PKB mengeluarkan rekomendasi kepada bacakada," kata Ketua Desk Pilkada DPC PKB Sidoarjo Abdillah Nasih. Setidaknya ada empat hal yang harus disiapkan bakal calon. Yakni, visi-misi tentang PKB, visi dan misi dalam pencalonan, potensi dukungan partai politik selain PKB, dan strategi kemenangan dalam pilkada.

Setelah UKK selesai, DPP PKB bakal memberikan surat tugas kepada bakal calon. Surat tugas



TEBAR VISI-MISI: Deretan baliho calon bupati Sidoarjo di Jalan Raya Ploso kemarin.

tersebut jadi kesempatan bakal calon untuk meningkatkan elektabilitas sebelum nanti rekomendasi diberikan. "Jika ada yang menyebut rekomendasi sudah turun, dipastikan itu tidak benar. Karena masih menunggu hasil UKK," ujar Nasih.

Sekretaris Desk Pilkada DPC PKB Sidoarjo Sihabudin menambahkan, para calon tersebut sudah diundang. Sementara ini

UKK masih diperuntukkan bakal calon bupati. "Sementara ini masih yang bakal calon bupati, untuk bakal calon wakil bupati menunggu instruksi dan undangan dari DPP PKB," katanya.

Sihab mengatakan, ada bakal calon bupati tersebut yang mendaftar secara langsung ke kantor DPC PKB Sidoarjo. Namun, ada pula yang mendaftar secara *online* tanpa ke DPC PKB

Enam Bakal Calon Bupati dari PKB yang Mengikuti UKK

- ▶ **Subandi**
Plt bupati Sidoarjo
- ▶ **Usman**
Ketua DPRD Sidoarjo
- ▶ **Achmad Amir Aslichin**
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, putra mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah
- ▶ **Fandi Utomo**
Mantan anggota DPR RI (periode 2014–2019)
- ▶ **Sugiono Adi Salam**
Pengusaha asli Sidoarjo
- ▶ **Muhammad Shofi**
Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Sidoarjo



GRAFIS RIZKY/JAWA POS

Sidoarjo. "Semua cakada harus didaftarkan di [link sicakada.pkb.id](http://link.sicakada.pkb.id), bisa daftar sendiri atau didaftarkan tim *desk* pilkada," kata Sihab.

Dia menyebut, Fandi Utomo dan Sugiono mendaftar secara *online*. Berkas pendaftaran juga di-*upload* secara *online*. "Berkas tidak harus diserahkan ke DPC Sidoarjo, cukup *online*, tapi beliau sudah konfirmasi ke DPC," jelasnya. (uzi/c6/any)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD Sidoarjo Gelar Rapat Paripurna Bahas Pertanggungjawaban APBD Sidoarjo Tahun 2023

oleh gas 🕒 13 Juni 2024

BAGIKAN



SIDOARJO (global-news.co.id) – DPRD Sidoarjo menggelar rapat paripurna membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 Plt. Bupati Sidoarjo di Gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (12/6/2024).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Sidoarjo, H. Usman didampingi wakil ketua, Kayan, SH dan Emir Firdaus beserta anggota Dewan berjumlah 26 orang. Turut hadir pula, Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi, Forkopimda dan sejumlah kepala OPD Pemkab Sidoarjo.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dalam rapat paripurna ini dilaksanakan penyampaian pandangan dari fraksi-fraksi. Untuk fraksi PKS dibacakan oleh Anang Ma'ruf. Dia mengatakan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 dinilai sangat penting karena merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah.

“Kami berharap Pemkab Sidoarjo dapat saling bersinergi dengan DPRD Sidoarjo tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,” katanya.



Fraksi PKS menyampaikan beberapa hal antara lain:

1. Mengapresiasi kinerja Pemkab Sidoarjo dalam melakukan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023. Untuk kedepannya berharap Pemkab Sidoarjo semakin akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah Kab. Sidoarjo dan lebih keras lagi dalam penataan perencanaan keuangan dengan lebih kreatif, efektif dan efisien sehingga bisa memaksimalkan efek kinerja di akhir tahun 2021- 2024.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

2. Meningkatnya jumlah piutang daerah.

Pemkab Sidoarjo harus berupaya mengurangi piutang daerah secara signifikan dan bagaimana langkah strategisnya?

3. Setelah mencermati hasil laporan

pelaksanaan APBD 2023, realisasi belanja

pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan

yang disebabkan karena Kepala BKD terlambat

menjalankan surat keputusan Bupati, sehingga

kondisi tersebut mengakibatkan realisasi

belanja pegawai tidak mencerminkan kondisi

sebenarnya. Yang kami pertanyakan, bagaimana

sistem pengawasan berkala terhadap semua

OPD mengenai kebijakan tersebut dan SOP

tersebut? Apakah ada pemberian sanksi

terhadap tindakan tersebut sesuai dengan

tingkat kesalahannya?



4. Dalam temuan BPK bahwa belanja pegawai Kab. Sidoarjo dinilai cukup besar. Bagaimana cara mengurangi belanja pegawai dan bagaimana cara menyikapi hal tersebut?

5. Diharapkan Pemkab Sidoarjo dapat mengarahkan penggunaan SILVA yang dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah sehingga kami perlu mendapatkan penjelasan kebijakan penggunaan hal tersebut?





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

6. Adanya perbedaan laporan dari tahun 2021 – 2023. Apa yang menjadi penyebab perbedaan dan bagaimana upaya agar hal yang tidak terulang lagi?

7. Bagaimana sistem pengendalian internal dan Pemkab Sidoarjo dalam upaya mendorong peningkatan efektifitas, management efektif, pengendalian dan data kelola organisasi sesuai perundang-undangan serta bentuk yang dilakukan untuk menerapkan tindakan tersebut?

8. Meminta komitmen Pemkab Sidoarjo hibahkan 37 M ke provinsi untuk dijadikan SMK.

9. Pemkab Sidoarjo harus komitmen untuk dapat menaikkan angka rata-rata lama sekolah dari 10.78 menjadi 12 serta melakukan perbaikan sekolah harus sudah diselesaikan tahun 2024 – 2025.

10. Perlu mendapatkan penjelasan mengenai jenis persediaan obat-obatan, bimbingan kesehatan, jumlah dan kondisi obat yang kedaluwarsa guna mendukung kegiatan operasional Pemkab Sidoarjo kepada masyarakat.

Sebelum acara ditutup, Ketua DPRD Sidoarjo meminta semua fraksi menyerahkan berkas laporan pembahasan terhadap pertanggungjawaban APBD 2023.**(win)**





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PEMERINTAHAN

Lima Komisisioner KPU Sidoarjo Periode 2024-2029 Diumumkan, Berikut Daftarnya..

Liputan Sidoarjo.com

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- Melalui pengumuman nomor 70/SDM.12-Pu/04/2024 tentang calon anggota KPU Kabupaten / kota terpilih di Jawa Timur periode 2024-2029, dan Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 708 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih, untuk Kabupaten Sidoarjo, terpilih lima nama komisisioner KPU Sidoarjo baru.

Liputan Sidoarjo.com



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

yakni

1. Ahmad Nidhom
2. Fauzan Adim
3. Haidar Munjid
4. Mokhammad Yasin
5. Muhammad Natsiruddin Yahya

Dari kelima nama ini, satu satunya incumbent yang kembali terpilih menjadi anggota KPU Sidoarjo untuk lima tahun kedepan adalah Fauzan Adim yang sebelumnya bertanggung jawab pada Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas.

Ada satu nama yang juga familier yang terpilih menjadi anggota KPU Sidoarjo, yakni Haidar Munjid ketua Bawaslu Sidoarjo periode 2019-2024.

Selanjutnya kelima anggota KPU Sidoarjo terpilih ini, akan dilantik serentak di KPU Propinsi Jawa Timur. (Abidin)

Liputan Sidoarjo.com

Soal WTS Ketua DPRD Sidoarjo: Tetap Diberikan Motivasi untuk Tujuan Hidup Baru dan Tinggalkan Zona Buruk



Redaksi Filesatu

11 Juni 2024 | 22:21 528 views





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Filesatu.co.id, **SIDOARJO** | Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman M., Kes menghadiri kegiatan kegiatan sosial yang diselenggarakan Dinas Sosial untuk memberikan bimbingan dan motivasi bagi tuna susila.

Kegiatan yang ditempatkan di Rumah Singgah ODHA Kabupaten Sidoarjo Jl. Lebo, Sidoarjo juga dihadiri puluhan penyandang tuna susila. Para tuna susila diberikan motivasi untuk mencegah potensi buruk, stigma publik atas WTS atau PSK wajib ditangani serius, terarah, terukur dan berkesinambungan dari berbagai permasalahan awal dari Kebutuhan Primer, Disharmonisasi keluarga, Korban KDRT kekerasan seksual atau lainnya.



“Hal ini harus ditangani secara serius hidup layak mengangkat harkat dan martabat pribadi pelaku tuna susila, disini peran Pemerintah Daerah Sidoarjo, dunia usaha dan komunitas publik lain untuk ikut serta berpartisipasi dalam penanggulangan dan penanganan Tuna Susila,” ungkap Ketua DPRD Sidoarjo H.Usman. Selasa (11/6/2024).

Menurutnya, harus segera Resosialisasi jadi prioritas, memberikan bimbingan ketrampilan dan pemberian Stimulan bantuan usaha, rehabilitasi kesehatan untuk redam penyebaran Penyakit menular seksual (PMS).





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

“Maka tuna susila mampu kembali berinteraksi secara wajar berbekal ketrampilan,” tambahnya.

H.Usman menambahkan, tujuan hidup baru dan segera tinggalkan zona buruk yang kurang bermanfaat dan senantiasa berfikir atau berperilaku positif.

“Siap hidup mandiri berbekal kemampuan pasca Rehabilitasi, tujuan Rehabilitasi atau Resosialisasi berbasis edukasi dan motivasi agar dapat memulihkan harga diri mental dan rasa percaya secara psiko-sosial membentuk kesadaran tanggung jawab masa depan diri keluarga dan lingkungan sosial lingkungan sekitar.



“Karena selama ini sering dianggap pelaku negatif oleh masyarakat, sering kali dipandang sebelah mata. Dalam hal ini adalah tugas Pemda khususnya di Sidoarjo dibawah Dinas Sosial untuk turut serta mengembalikan dan memberikan arahan para pelaku seksual tanpa pernikahan atau disebut sebagai tuna sosial (tuna susila),” jelas H Usman.

Dikesempatan itu, H.Usman juga memberikan arahan secara realistis agar mengendalikan jati diri dan rasa takut tentang koridor keimanan, ketertiban, ketentraman masyarakat kepastian hukum berbasis Program terpadu secara Prevensif, Reprensif dan Rehabilitatif.

“Pelatihan berbasis keagamaan, tata nilai dan norma kesusilaan untuk tumbuhkan kesehatan mental. Menciptakan lapangan kerja sesuai bakatnya, wawasan dampak seks bebas dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga,”pungkasnya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bacabup H. Usman Ikuti Fit & Proper Test DPP PKB: Mohon Doa Restu Dukungan Semua Elemen Masyarakat Sidoarjo



Redaksi Filesatu

13 Juni 2024 | 21:46 595 views



[Filesatu.co.id](https://filesatu.co.id), SIDOARJO | **Pemilihan kepala daerah** serentak di tahun 2024 menyisakan waktu tinggal beberapa bulan kedepan. Sejumlah calon kepala daerah (Cakada) kabupaten maupun kota sudah mulai bermunculan dengan berbagai atributnya.

Kabupaten Sidoarjo misalnya, sudah ada empat calon dari partai berlambang Bintang Dunia (PKB) untuk maju pencalonan pada Pilkada menjadi bakal calon Bupati maupun Wakil Bupati (Bacabup-Bacawabup) 2024.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Seperti di Pemilu lalu, Partai Kebangkitan Bangsa sebagai pemilik suara terbanyak, di Pilkada saat ini sudah ada empat Bacabup yang mendaftar dan sudah mengembalikan formulir penjaringan.

Salah satunya tokoh PKB H Usman M.Kes yang sudah bergerak berpolitik melalui poster Baleho besar. Terlihat sudah terpasang di setiap sudut Kota Sidoarjo, hal itu menandakan keseriusan untuk menjadi pemimpin Sidoarjo, terbukti ikut dalam daftar penjaringan PKB Kabupaten Sidoarjo.

H Usman, selain menjabat Ketua DPRD Sidoarjo periode 2019-2024, Politisi yang ramah dan mengakar rumput dengan masyarakat Sidoarjo ini telah menerima surat undangan untuk melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan atau UKK Bakal Calon Kepala Daerah sesuai dengan mekanisme Partai di Kantor DPP PKB Jakarta.





H.Usman dengan sapaan khas Aba Usman saat dikonfirmasi awak media membenarkan jika ada surat undangan untuk mengikuti UKK Bakal Calon Kepala Daerah di DPP PKB.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"Iya betul, sesuai undangan untuk mengikuti UKK, rencananya pada hari Jumat 14 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 wib sampai selesai di DPP PKB, sepertinya kita menyampaikan visi dan misi dalam pencalonan termasuk potensi dukungan dari partai politik selain PKB,"kata Aba Usman membalas konfirmasi media ini. Kamis (13/6/2024).

Selain membenarkan dapat kabar undangan ke DPP PKB, kini juga muncul pesan singkat berantai melalui WhatsApp Grup (WAG) mengenai Aba Usman meminta restu warga Sidoarjo juga para simpatisan, relawan yang loyal baik insan Partai serta militan yang mendukung untuk mengikuti UKK Aba Usman di DPP PKB untuk memaparkan visi misi, konsep yang akan diusung, serta strategi pemenangan.



Dengan modal dalam Pemilu lalu, Suara PKB memperoleh 298.735 suara atau 15 kursi di DPRD Sidoarjo diharapkan akan menang untuk kesekian kalinya di Kota Delta itu.

Sekedar untuk diketahui, H.Usman adalah Alumnus FKG UNAIR Prodi tahun 2003 melanjutkan S2 Magister Kesehatan (M.Kes) 2008. Sepak terjang H.Usman sejak berdirinya PKB di kancah politik bukan orang baru dan tidak pernah lompat pagar sosok konsekuen dan komitmen pada Partai yang diembannya dari awal yang ikut serta membesarkannya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Atas kepercayaan masyarakat Sidoarjo, kali ini Aba Usman siap dan ikut serta maju di Pilkada serentak tahun ini siap mengemban Amanah mencalonkan Bacabup Sidoarjo 2024-2029.

Mengenai tugasnya, dari awal sejak menjabat menjadi anggota DPRD sampai Ketua DPRD praktis tidak ada celah negatif dan sering turun langsung menyentuh masyarakat bawah dan kini masyarakat semakin cerdas dalam memilih dan memilah mencari figur pemimpin khususnya di Sidoarjo. Empat kandidat yang sudah mendaftar di Cakada Partai Kebangkitan Bangsa Sidoarjo yang siap berkonsentrasi dalam Pilbup bulan November 2024 nanti. (***)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sumringah,..242 Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo Terima SK Perpanjangan Jabatan



dnnmedia.net 

Thursday, June 13, 2024, June 13, 2024 WIB



Plt Bupati Sidoarjo, H Subandi saat memberikan SK perpanjangan jabatan pada salah satu Kepala Desa



DNN, SIDOARJO – Nampak sumringah wajah 242 Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo saat menerima surat keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan menjadi 8 tahun dari Plt Bupati Sidoarjo H. Subandi di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (20/06/2024) pagi tadi.

Para kades tersebut juga nampak penuh semangat karena pengabdian mereka untuk membangun desa diperpanjang, dari 6 tahun menjadi 8 tahun, artinya ada tambahan dua tahun masa bakti. Sesuai Undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Plt Bupati Sidoarjo, Subandi berpesan, kepala desa yang sudah mendapat perpanjangan masa jabatan untuk bekerja lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk mewujudkan kemandirian desa, baik secara ekonomi, sosial maupun politik.

“Dengan tambahan 2 tahun masa jabatan ini kami harapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan program-program pembangunan untuk kemajuan desa,” kata Subandi.



Dia juga mengajak semua kepala desa untuk saling bersinergi, berdiskusi dan saling memberikan dukungan satu sama lain. Subandi ingin desa-desa di Kabupaten Sidoarjo bisa mandiri. “Yang tak kalah penting juga menjaga kondusifitas pemerintah desa,” ucapnya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Menurutnya desa yang mandiri akan berkontribusi pada pertumbuhan berbasis keunggulan sumber daya dan kebutuhan lokal.

Selain itu desa yang mandiri akan efektif dan efisien dalam menyediakan layanan publik, pengelolaan anggaran dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.



**“Saya juga menekankan agar pelayanan publik harus menjadi prioritas bagi kepala desa beserta jajarannya. Dimana reformasi birokrasi tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetapi juga di level pemerintah desa,”
lanjutnya**

la juga mengajak kepala desa untuk menciptakan kemandirian desa khususnya dari aspek pendapatan asli desa (PAD). Setiap potensi yang ada bisa dikembangkan dan bisa berkolaborasi dengan banyak pihak untuk mensupport pembangunan yang ada di desa masing-masing.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

“Kolaborasi dengan semua stakeholder dan masyarakat ini sangat penting untuk menunjang percepatan pembangunan yang ada di desa,” ungkapnya.

**Lebih lanjut, setiap berada di forum kepala desa, Ia selalu menyerukan program penurunan kasus stunting di Kabupaten Sidoarjo, terutama dalam menggalakkan Sidoarjo bebas Open Defecation Free (ODF) .
(hans)**



Siswa Belajar di Tempat Darurat, Komisi D DPRD Sidoarjo Minta Pemkab Segera Bangun Ruang Kelas Baru

by [ZonaJatim00](#) - 14 Juni 2024



Zonajatim.com



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Baru-baru ini proses belajar mengajar SDN Lajuk dan Gedang I terkendala karena ruang kelas tidak memadai. Akibat kekurangan ruang kelas akhirnya siswa dimasukkan pagi dan siang hari.

Kepala SDN Gedang I Ny Makhnun Niroh mengatakan karena kondisi kelas tak memadai, siswa kelas II terpaksa menggunakan mushola untuk kegiatan belajar. Saat ini SDN Gedang I mempunyai 10 kelas, yang 4 kelas paralel dengan jumlah siswa sebanyak 273 siswa, pada tahun ajaran baru ini sudah menerima 52 siswa. "Kami berencana membangun 2 lokal lagi, karena kekurangan kelas ini maka terpaksa kami menggunakan musala untuk giat belajar

Zonajatim.com

mengajar. Semoga pemkab segera membangun ruang kelas baru agar siswa bisa belajar dengan nyaman dan tenang. Selain itu kami juga berharap untuk renovasi ruang guru karena jika terjadi hujan pasti air masuk kedalam ruangan dan sering merendam peralatan penunjang proses belajar mengajar,” katanya.



Siswa SDN Gedang 1 terpaksa belajar di Mushola lantaran ruang kelas kurang



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sedangkan Kepala Sekolah SDN Lajuk Buasim menjelaskan, kondisi tersebut sudah terjadi 3 sampai 4 tahun lalu. Oleh karena itu pihaknya berharap ada penambahan dua ruang kelas baru untuk menampung siswa siswinya yang belajar di musala dan perpustakaan sekolah."SDN Lajuk memiliki dua lokasi, yang di Utara kemarin rusak dan alhamdulillah sudah direnovasi, tetapi sekolah di sini butuh dua lokal kelas karena Rombelnya 12 sedangkan ruang kelas yang tersedia hanya 10," ucapnya.

Zonajatim.com

Menurut Buasim penambahan ruang kelas akan dibangun di SDN Lajuk yang berada di sebelah Utara. Saat ini SDN Lajuk yang berlokasi di Utara hanya memiliki 3 ruang kelas.

Mereka prihatin menjelang tahun ajaran baru 2024-2025, sejumlah sekolah, muridnya belum mendapat tempat belajar yang memadai karena kurangnya ruang kelas untuk belajar, sehingga untuk sementara mereka belajar di tempat darurat seperti mushola, ruang perpustakaan dan rumah warga serta tempat lainnya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Abdullah Nasih meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk segera membangun ruang kelas baru guna menampung siswa yang selama ini belajar di tempat darurat. "Kami juga mengusulkan agar masukkan alokasi dana untuk penganggaran pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk beberapa sekolah," katanya, kemarin.

Zonajatim.com



Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo dari PKB Abdillah Nasih

Nasih mencontohkan jika ada beberapa ruangan di SDN Gedang 1 Porong yang ukurannya sempit untuk menampung jumlah siswa sebanyak 35 anak, sehingga tidak dapat memakai ruang itu dan pindah ke mushola untuk kegiatan belajar sekolah.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Politisi PKB asal daerah pemilihan Kecamatan Waru ini menyebut, pembangunan RKB jangan berdasarkan berapa yang diperlukan saat ini semata. Jika seperti itu dirinya meyakini akan ada masalah lagi kedepannya. "Jadi jangan dipikir lagi berapa ruangan yang dibutuhkan. Bikin ruang lebih agar bisa digunakan untuk kegiatan lain. Nanti tahun 2025 kurang lagi, bangun lagi nantinya, muncul lagi permasalahan yang sama," jelasnya.

Sekolah yang kelebihan murid juga diharapkan melakukan penambahan ruang kelas. "Penambahan ruang kelas bagi sekolah yang memungkinkan segera dilakukan penambahan," paparnya.

Zonajatim.com

Hj Mimik Idayana anggota Komisi D DPRD Sidoarjo ikut menyoroti permasalahan sarana prasarana ruang kelas baru yang masih kurang di berbagai Sekolah SD. Kurangnya ruang kelas baru tersebut berdampak saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi di batasi.

Hj Mimik menyebutkan, sarana prasarana ruang kelas masih harus ditambah khususnya pada sekolah-sekolah yang peminat muridnya banyak, namun ruang kelasnya terbatas."Sekolah SD di pedesaan menjadi jujukan warga sekitar untuk menyekolahkan anaknya yang dekat dari rumah. Namun ruang kelasnya terbatas sehingga sekolah tidak bisa menolak dan terpaksa mereka belajar di luar ruang kelas," kata Hj Mimik Idayana.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo dari Partai Gerindra Hj Mimik Idayana

Di tiap sekolah masalahnya hampir sama rata-rata adalah rombongan belajar. memang tidak bisa ditambah lagi dan itu berkaitan dengan sarana prasarana ruang kelas yang harus masih ditambah, imbuh politisi Partai Gerindra ini.

Zonajatim.com

Hj Mimik menyatakan, pihaknya mengusulkan solusi permasalahan tersebut ke Dinas Pendidikan, melihat adanya lahan kosong yang masih bisa dibangun Ruang kelas Baru agar bisa menampung lebih banyak lagi peserta didik baru."Tentu yang bisa dimaksimalkan adanya potensi lahan tambahan raung kelasnya. Mudah-mudahan memang nanti kita bisa bantu juga memperjuangkannya, karena animo dari masyarakat dan juga peserta didik baru ini sangatlah tinggi," tuturnya.

Zonajatim.com



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Lebih lanjut Hj Mimik mengharapkan, pembangunan sarana prasarana ruang kelas baru bisa diwujudkan diberbagai sekolah yang peminatnya tinggi dan juga didukung oleh Pemkab Sidoarjo sehingga siswa bisa belajar dengan nyaman."Mudah-mudahan nanti di tahun 2025 kita bisa rencanakan bukan hanya SD saja tapi juga SMP juga harus diperhatikan oleh Pemkab Sidoarjo dimana sarana prasarana lahan menjadi yang utama untuk saat ini sehingga kualitas nantinya bisa menghasilkan lulusan lulusan dan juga generasi penerus di Sidoarjo yang lebih baik lagi," pungkas Hj Mimik Idayana.

Zonajatim.com

Mengatasi persoalan kurang ruang kelas setiap tahunnya, Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo meminta Pemkab menambah ruang kelas baru (RKB). "Kami sepakat bahwa atensi ruangan kelas belajar harus ditambah di beberapa sekolah di sejumlah kecamatan. Kami semua sudah sepakat dan menyatakan untuk penambahan," ucap Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso.

Zonajatim.com



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Lebih lanjut Bangun menerangkan, kapasitas ruang belajar menjadi salah utama persoalan saat tahun ajaran baru masuk sekolah, yang berdampak pada minimnya penerimaan peserta didik di tiap sekolah. Peralnya, jumlah penduduk di Kota Delta setiap tahun semakin bertambah. Sedangkan, gedung sekolah atau ruang kelas baru setiap tahun tidak bertambah.



Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo dari PAN Bangun Winarso

Zonajatim.com

“Kami wakil rakyat prinsipnya terkait dengan penambahan ruang kelas tidak masalah bahkan kami dorong untuk menambah alokasi anggarannya. Asalkan sekolah itu memang tidak punya ruang kelas yang memadai,” kata Bangun Winarso politisi dari PAN ini.

Sementara itu Zahlul Yussar Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo dari Partai Demokrat juga mendorong Pemkab untuk segera mengajukan kepada dewan soal kebutuhan ruang kelas baru yang masih kurang di sekolah negeri di wilayah Sidoarjo. Hal itu diingatkan oleh Zahlul agar Pemkab segera menanggapi soal itu.”Jadi waktu sidak Plt Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan bahwa sejumlah sekolah SD masih banyak membutuhkan ruang kelas baru (RKB), karena kelebihan murid dan ruang kelas rusak,” katanya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Menurut Zahlul, kebutuhan RKB diperlukan agar para siswa bisa belajar dengan baik dan nyaman terlebih mau masuk tahun ajaran baru. "Nah, spirit pada saat itu saya ketemu dengan kepala sekolah, saya berharap ada pembangunan ruang kelas baru di sekolah yang kelebihan murid dan kondisi sarana dan prasarana yang minim," ujarnya.

Zahlul menjelaskan bahwa pembangunan ruang kelas baru nanti bisa dibahas oleh dewan. Ia menegaskan bahwa RKB adalah kebutuhan pokok yang harus dewan respons. "Yang penting Pemkab mengajukan kepada kami pada saat pembahasan anggaran, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak merespon permintaan dari pemkab," tegasnya.

Zonajatim.com



Anggota Komisi D DPRD dari Partai Demokrat Zahlul Yussar

Zahlul juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencerdaskan anak bangsa. Kata Zahlul yang paling penting adalah outputnya."Sehingga pemimpin-pemimpin masa depan di Sidoarjo dan nasional akan muncul dari siswa Sidoarjo," ujarnya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Disisi lain, anggota D DPRD Kabupaten Sidoarjo Aditya Nindyatman, menambahkan pihaknya mendukung penambahan ruang kelas baru bagi sekolah-sekolah yang jumlah muridnya sudah jauh melebihi daya tampung."Pada prinsipnya kami mendukung agar bisa ada program penambahan ruang kelas baru dikarenakan fasilitas yang ada sudah tidak mencukupi untuk menampung kegiatan belajar di sekolah tersebut," kata Aditya.

Zonajatim.com

Pernyataan itu disampaikan Aditya menanggapi keluhan kekurangan ruang kelas yang dialami SDN Gedang 1 dan SDN Lajuk Porong. Di sekolah itu, jam masuk sekolah terpaksa diatur bergantian antarkelas karena jumlah ruang kelas yang ada tidak cukup menampung seluruh murid dalam waktu bersamaan.



Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo dari PKS Aditya Nindyatman



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Aditya memberi perhatian serius terkait masalah ini karena berdampak terhadap kualitas pendidikan masyarakat. Dia berharap penambahan ruang kelas baru (RKB) bisa dipenuhi sesuai kebutuhan di lapangan."Tetapi tentu sambil nanti kita melihat kemampuan keuangan daerah, apakah program tersebut bisa diakomodir atau tidak, karena permasalahan kekurangan ruang kelas ini bukan hanya terjadi di sekolah tersebut, sekolah lain pun tidak sedikit menghadapi permasalahan serupa, oleh karena itu, kita minta Pemkab Sidoarjo untuk merespon kebutuhan pembangunan ruang kelas baru untuk sekolah yang membutuhkan," tegas Aditya politisi PKS ini. Sp/adv

Zonajatim.com